

**ANALISIS WILAYAH PERTAMBANGAN KOMODITAS TAMBANG GOLONGAN BATUAN
BERDASARKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
DI KECAMATAN TALANG KELAPA DAN KECAMATAN RAMBUTAN
KABUPATEN BANYUASIN**

**ANALYSIS OF MINING AREAS COMMODITIES MINE ROCK TYPES
BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
AT TALANG KELAPA AND RAMBUTAN DISTRICT
BANYUASIN REGENCY**

Yoan Desianda

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Banyuasin termasuk dalam kelompok golongan komoditas tambang batuan meliputi bahan galian Tanah Urug, Tanah Liat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam suatu wilayah merupakan syarat utama untuk penerbitan perizinan. Penetapan WPR oleh pemerintah untuk Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan Umumnya belum ada sampai saat ini, otomatis perizinan pertambangan golongan batuan tidak dapat diterbitkan, sehingga dipandang perlu dilakukan penelitian. Jenis Metode penelitian deskriptif, berdasarkan fakta yang nampak, juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif wilayah pertambangan rakyat. Pemakaian data *spasial* berguna untuk menggambarkan wilayah pertambangan. Sampel penelitian 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu Talang Kelapa dan Rambutan. Teknik pengambilan data melalui observasi lapangan, interview dan dokumentasi. Teknik analisis data *spasial* secara analisis *Buffer* untuk kewilayahan dan analisis *Skalogram* untuk melihat pengaruh perkembangan wilayah dari adanya kegiatan penambangan. Data disajikan dalam bentuk tabel, narasi dan peta untuk interpretasi data. Hasil penelitian, banyak penambangan rakyat ilegal seperti di Kecamatan Talang Kelapa 8 Ha berizin dan 128,67 Ha ilegal, Kecamatan Rambutan 27,21 Ha berizin dan 317,22 Ha ilegal, lahan bekas tambang tidak di reklamasi, dekat pemukiman dan usaha lain, pertambangan rakyat tidak diakomodir pada peta pola ruang RTRW Kabupaten, lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SIG penting untuk identifikasi, inventarisir wilayah pertambangan, mempermudah analisis. Kecamatan Talang Kelapa sulit untuk dilakukan pengembangan wilayah, di Kecamatan Rambutan relatif banyak wilayah potensial, yaitu 9 (sembilan) blok dengan luas 211,91 Ha. dengan nilai keekonomian yang akan diperoleh pemerintah Rp. 83.395.834.661,85,-. Disarankan seyogyanya dilakukan revisi RTRW dengan melihat kondisi *eksisting* dan aturan yang berlaku, peningkatan sumberdaya aparat terkait pengawasan, pengendalian, penertiban usaha tambang, gunakan SIG serta dibuat program reklamasi untuk meminimalkan lahan kritis.

Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, komoditas tambang golongan batuan, *spasial*, *buffer*, *skalogram* RTRW.

I. PENDAHULUAN

Mineral dan Batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009).

Kegiatan pertambangan rakyat di Kabupaten Banyuasin termasuk dalam komoditas tambang golongan batuan meliputi komoditas tambang Tanah Urug, Tanah Liat dan Pasir Sungai sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Informasi geografis dalam bentuk yang paling sederhana adalah sebuah informasi yang berkaitan dengan lokasi tata letak objek tertentu yang selanjutnya diperluas fungsinya sebagai alat bantu

dalam memproses data spasial sehingga menjadi informasi (Cholid, 2009).

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam suatu wilayah merupakan syarat utama untuk penerbitan perizinan. Penetapan WPR oleh pemerintah untuk Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan Umumnya, dan dari hasil penelusuran di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia belum ada sampai saat ini, otomatis perizinan pertambangan rakyat komoditas tambang golongan batuan tidak dapat diterbitkan, untuk mempermudah dalam melakukan analisis maka penetapan WPR ini dilakukan dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Perumusan masalah :

1. Bagaimana menginventarisir dan mendeskripsikan kegiatan usaha pertambangan golongan batuan;
2. Bagaimana kriteria dan analisis wilayah untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
3. Bagaimana pengembangan wilayah pertambangan golongan batuan yang diharapkan

Dapat mengoptimalkan keberlanjutan pertambangan dan lingkungan.

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan mendeskripsikan seluruh kegiatan usaha pertambangan golongan batuan;
2. Menentukan kriteria dan melakukan analisis wilayah untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Banyuasin;
3. Mengembangkan wilayah pertambangan golongan batuan yang diharapkan dapat mengoptimalkan keberlanjutan pertambangan dan lingkungan.

Hasil diharapkan memberi manfaat tentang pentingnya penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di suatu wilayah terhadap keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan rakyat terutama di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, selain itu juga dapat menjadi masukan untuk pemerintah Kabupten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan secara umum sebagai acuan dalam penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) serta pelaksanaan pengelolaan sumberdaya secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan manfaat akhir untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2015 pada 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu : Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan.



Gambar 1. Daerah Penelitian

2. Alat dan Bahan

a. Alat

Alat-alat yang digunakan untuk kegiatan lapangan dan pengolahan data, antara lain : GPS (Global Positioning System), Komputer, program aplikasi sistem informasi geografis (Program MapInfo), Program aplikasi Map Source, kuesioner, Program Aplikasi Microsoft Excell.

b. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah : Peta Citra Satelit, Foto Udara, Peta Kontur, Peta Geologi, Peta administrasi, Laporan kegiatan usaha pertambangan rakyat, Dokumen izin pertambangan rakyat, Statistik daerah penelitian, data lahan bekas

tambang, data pemukiman, data kegiatan usaha lain di sekitar kegiatan pertambangan, data lahan potensial

3. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dimana akan digambarkan secara mendalam suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Populasi penelitian adalah blok bukaan tambang rakyat yang ada di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan. Sampel penelitian adalah blok bukaan tambang rakyat untuk Kecamatan Talang Kelapa, yaitu : blok bukaan tambang di Kelurahan Air Batu, Kelurahan Suko Moro, Kelurahan Sukajadi dan Desa Sungai Rengit, sedangkan untuk Kecamatan Rambutan, yaitu : blok bukaan tambang di Desa Sungai Dua, Desa Menten, Desa Sako, Desa Gelebak Dalam, Desa Tanjung Merbu dan Desa Rambutan. Penetapan Sampel penelitian secara *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan lamanya blok ditambang.
- b. Populasi penelitian adalah masyarakat yang bermukim di sekitar kegiatan tambang rakyat dan jalan yang dilalui untuk mengangkut hasil produksi di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan. Sampel penelitian adalah masyarakat yang terkena dampak akibat penambangan dan pengangkutan hasil produksi. Penetapan Sampel penelitian secara *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan masyarakat yang berada di sekitar penambangan dan pengangkutan hasil produksi adalah yang langsung terkena dampak. Jumlah responden terpilih yang digunakan sebanyak 10 (sepuluh) orang, sedangkan untuk kuesioner tertutup diambil sampel masing-masing 50 (lima puluh) orang tiap kecamatan.
- c. Populasi penelitian adalah semua pelaku usaha tambang rakyat di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan. Sampel penelitian adalah pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya saat dilakukan penelitian. Jumlah responden terpilih yang digunakan sebanyak 8 (delapan) orang ditetapkan secara *purposive sampling*.
- d. Populasi penelitian adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyuasin, pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, pegawai Kantor Camat dan Kantor Kelurahan. Sampel penelitian adalah pejabat eselon II, III, IV dan Staf instansi diatas. Jumlah responden terpilih yang digunakan sebanyak 8

(delapan) orang ditetapkan secara *purposive sampling*.

5. Prosedur Kerja

Langkah-langkah kerja secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu : pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

a. Pengumpulan data, dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu: observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi;

1. Observasi (Pengamatan Lapangan); Pengamatan langsung dilapangan dilakukan dengan alat bantu berupa GPS. Data yang diperoleh dari pengamatan tersebut berupa angka-angka koordinat dari variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang sudah dijelaskan di atas untuk dapat di proses dalam sistem informasi geografis.

2. Interview (Wawancara); Berdasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi yang langsung didasarkan pada subjek yang memahami permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti, seperti pimpinan instansi yang terkait dengan pertambangan, pegawai yang bertugas melakukan proses pelayanan dan pengawasan pertambangan dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pertambangan.

3. Dokumentasi; Data dokumentasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan, keputusan bupati dan data-data lain yang terkait yang dianggap perlu untuk menunjang penyelesaian penelitian.

b. Pengolahan data, seluruh data lapangan yang berupa data spasial diolah dengan menggunakan program aplikasi sistem informasi geografis berupa program aplikasi *MapInfo*, sedangkan data lapangan berupa hasil wawancara dirangkum secara narasi;

c. Analisis data, data yang sifatnya spasial dianalisis dengan analisis *Overlay*, Analisis *Buffer*, Analisis kesesuaian lahan dan analisis kesesuaian dengan RTRW kabupaten. Sedangkan data untuk melihat pengaruh kegiatan pertambangan terhadap sosial ekonomi dan budaya masyarakat menggunakan analisis *Skalogram*.

3 (tiga) pendekatan untuk menjalankan metoda *Skalogram*, yaitu :

- ✓ Pendekatan ada tidaknya sarana/prasarana yang diukur;
- ✓ Memperhitungkan jumlah dari sarana/prasarana yang ada serta dengan memperhitungkan bobot dari masing-masing sarana;
- ✓ Dilakukan dengan menggabungkan dari 2 (dua) pendekatan yang ada, yaitu dengan mengalikan bobot yang dimiliki oleh masing-masing fasilitas yang ada di suatu kawasan dengan jumlah riil dari fasilitas yang ada di masing-masing unit wilayah perencanaan.

Langkah kerja metoda *Skalogram*, adalah :

- ✓ Susun nama-nama wilayah di sisi kiri lembar kerja;
- ✓ jenis-jenis fasilitas disusun di sisi atas lembar kerja, dan dibuat melebar-mendatar;
- ✓ Isikan data-data yang ada, dengan ketentuan diusahakan wilayah yang mempunyai fasilitas terlengkap diletakkan di urutan paling atas, sehingga bisa mendekati bentuk diagonal. Hal ini berguna untuk memudahkan pembacaan dan analisis-interpretasi data;
- ✓ Sortir data yang ada, sehingga dimungkinkan perubahan susunan raw data untuk menuju konfigurasi ideal (membentuk diagonal);
- ✓ Jumlahkan isi data berdasarkan baris dan kolom (pendekatan Ya-Tidak);
- ✓ Kalikan jumlah suatu fasilitas yang tersedia dalam suatu wilayah dengan bobot yang dimiliki oleh fasilitas tersebut, setelah itu baru dijumlahkan berdasarkan baris dan kolom (pendekatan pembobotan);
- ✓ Berdasarkan jumlah kelengkapan fasilitas ini bisa ditentukan wilayah mana yang mempunyai tingkat kota (orde) tertinggi. Penentuan orde ini bisa dilambangkan hanya dengan orde I, II, III, IV dan seterusnya, bisa juga ditentukan dengan tingkat kota tinggi, sedang dan rendah.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan melalui SIG dan Analisis *Skalogram*.

a. Analisis Kesesuaian Lahan Pertambangan Rakyat

Analisis ini menggambarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kegiatan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk Kegiatan pertambangan. Gunanya untuk menentukan pengembangan lahan pertambangan rakyat dengan membandingkan persyaratan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 22 mengatur tentang kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pasal 24 dinyatakan bahwa wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

b. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Penentuan apakah wilayah tersebut dapat dikembangkan menjadi wilayah pertambangan rakyat, maka harus mengacu kepada ketentuan umum peraturan zonasi. Secara teknis, prosesnya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak sistem informasi geografis dengan menumpangsusunkan (*overlay*) data spasial yang di dapat dari lapangan

dengan peta spasial rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi.

c. Analisis Spasial

Analisa spasial dilakukan dengan meng-overlay-kan 2 (dua) peta yang kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis (Tuman, 2001). Fungsi analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini seperti analisis tumpangtumpang (overlay) dan analisis *buffer*.

d. Estimasi Potensi Komoditas Tambang

Potensi komoditas tambang akan dihitung secara matematis menggunakan metoda *Frustum* dan nilai ekonomi dihitung berdasarkan estimasi biaya yang dikeluarkan /m³. Berikut adalah persamaan metoda *Frustum* :

$$Volume = \frac{h}{3} (LuasA + LuasB + \sqrt{LuasA \times LuasB})$$

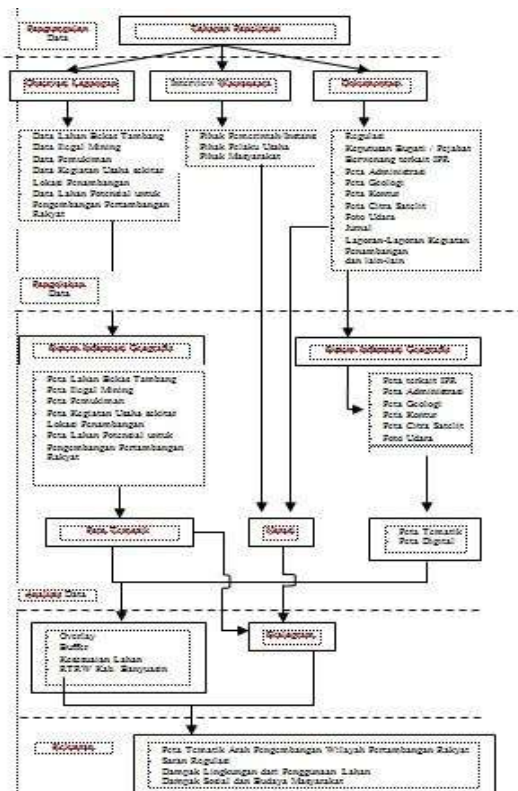
Dimana :

h = Beda tinggi, m
LuasA = Luas Atas, m²
LuasB = Luas Bawah, m²

e. Analisis Skalogram

Menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, 2005 bahwa alat analisis *skalogram* digunakan untuk mengidentifikasi kota kecamatan yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada ketersediaan fasilitas perkotaan dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Diagram Alir



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Sekunder Daerah Penelitian

a. Input Data Sekunder IPR

Hasil inventarisasi data IPR untuk wilayah Kecamatan Talang Kelapa pada periode tahun 2005-2008 sebanyak 11 (sebelas) izin pertambangan rakyat, 1 (satu) izin dijalankan oleh bentuk badan usaha dan 10 (sepuluh) izin lainnya merupakan bentuk usaha perorangan, dengan luas total 8,00 Ha.

IPR untuk wilayah Kecamatan Rambutan periode tahun 2005-2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) izin. 4 (empat) izin dijalankan oleh bentuk badan usaha dan selebihnya sebanyak 25 (dua puluh lima) izin adalah usaha perorangan, luas total 27,21 Ha.

b. Pengambilan Data Citra Satelit

Pengambilan data (*download*) citra satelit menggunakan bantuan aplikasi *SASPlanet*. Aplikasi *SASPlanet* terdapat kemudahan bahwa peta citra satelit atau peta lainnya dapat disimpan dalam bentuk ekstensi yang diinginkan.

c. Identifikasi Wilayah melalui Citra Satelit

Identifikasi wilayah kegiatan pertambangan rakyat menggunakan peta Citra Satelit berguna untuk mempermudah peneliti dalam melakukan survey di lapangan. Hasil dari verifikasi lapangan menunjukkan bahwa seluruh titik sampel identifikasi adalah benar merupakan wilayah kegiatan pertambangan rakyat, baik itu lahan yang sudah ditinggalkan maupun masih aktif dilakukan kegiatan penambangan seperti terlihat pada (Gambar 3).



Gambar 3. Lahan Tambang yang ditinggalkan di Desa Sungai Rengit (kiri), Lahan Tambang Aktif (kanan) di Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa



Gambar 4. Lahan Tambang yang ditinggalkan di Desa Gelebak Dalam (kiri), Lahan Tambang Aktif (kanan) di Desa Sako Kecamatan Rambutan

d. Deliniasi Wilayah Studi

Deliniasi wilayah studi untuk Kecamatan Talang Kelapa berdasarkan keberadaan kegiatan pertambangan rakyat dan kontur wilayah daerah tersebut, hasil *bloking area* didapat luasan wilayah deliniasi sebesar 724,5 Ha, mencakup Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Air Batu dan Desa Sungai Rengit.

Deliniasi wilayah studi untuk Kecamatan Rambutan didapat luasan wilayah sebesar 3.461 Ha, mencakup Desa Sungai Dua, Desa Pangkalan Gelebak, Desa Gelebak Dalam, Desa Menten, Desa Sako, Desa Tanjung Merbu dan Desa.

2. Pemetaan Sumberdaya Aparatur

Berdasarkan data di dinas pertambangan kabupaten hanya 3 (tiga) orang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan bagian pertambangan umum berbanding dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan.

Berdasarkan data dinas pertambangan provinsi hanya 4 (empat) orang melaksanakan tugas pokok dan fungsi inspektur tambang berbanding dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 16 (enam belas).

3. Pemetaan Daerah Penelitian

Pemetaan daerah penelitian bertujuan untuk menggambarkan keadaan *eksisting* yang berada dalam ruang lingkup penelitian dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (MapInfo).

a. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pemetaan wilayah IPR bertujuan untuk memastikan keberadaan izin tersebut terhadap wilayah administrasi desa/kelurahan. Hasil *overlay* di Kecamatan Talang Kelapa terdapat 6 (enam) izin usaha pertambangan berada di Kelurahan Air Batu dan 5 (lima) izin usaha pertambangan berada di Kelurahan Sukomoro.

Hasil *overlay* di Kecamatan Rambutan terdapat 1 (satu) izin usaha pertambangan berada di Desa Sungai Dua, 1 (satu) izin usaha pertambangan berada di Desa Menten, 4 (empat) izin usaha berada di Desa Gelebak Dalam, 13 (tiga belas) izin usaha berada di Desa Sako, 1 (satu) izin usaha berada di antara wilayah administrasi Desa Gelebak Dalam dan Desa Tanjung Merbu dan 9 (sembilan) izin usaha berada di Desa Tanjung Merbu.

b. Lahan Bekas Tambang

Di Kecamatan Talang Kelapa, Areal bukaan tambang terdiri dari 12 (dua belas) blok bukaan lahan dengan luas keseluruhan 128,67 Hektar sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi dan Luas Lahan Bekas Tambang Rakyat per Oktober 2015 di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

Blok	Lokasi	Luas (Ha)
1.	Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit	1,59
2.	Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit	34,00
3.	Kel. Air Batu, Ds. Sungai Rengit	6,47
4.	Kel. Air Batu	3,18
5.	Kel. Air Batu	0,92
6.	Kel. Air Batu	0,83
7.	Kel. Air Batu	1,52
8.	Kel. Sukomoro, Kel. Air Batu	32,98
9.	Kel. Air Batu	5,92
10.	Kel. Sukomoro, Kel. Air Batu	26,40
11.	Kel. Air Batu	2,19
12.	Kel. Sukajadi	12,67
Luas (Ha)		128,67

Sumber : Penelitian dan Pengolahan data, 2015

Di Kecamatan Talang Kelapa, areal bukaan tambang tersebut terdiri dari 22 (dua puluh dua) blok bukaan dengan luas keseluruhan 317,22 Hektar sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Lokasi dan Luas Lahan Bekas Tambang Rakyat per Oktober 2015 di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin

Blok	Lokasi (Desa)	Luas (Ha)
1.	Sungai Dua	8,78
2.	Menten	3,06
3.	Menten	0,89
4.	Menten	1,06
5.	Sako	26,28
6.	Sako	1,25
7.	Gelebak Dalam	2,18
8.	Gelebak Dalam	15,73
9.	Gelebak Dalam	2,63
10.	Sako	83,18
11.	Tanjung Merbu	31,99
12.	Tanjung Merbu	19,36
13.	Tanjung Merbu	31,61
14.	Tanjung Merbu	6,22
15.	Tanjung Merbu	14,00
16.	Tanjung Merbu	38,46
17.	Tanjung Merbu	4,14
18.	Tanjung Merbu	1,58
19.	Tanjung Merbu	2,19
20.	Tanjung Merbu	18,12
21.	Rambutan	2,51
22.	Rambutan	2,00
Luas (Ha)		317,22

Sumber : Penelitian dan Pengolahan data 2015

c. Penambangan Tanpa Izin

Pemetaan kegiatan penambangan tanpa izin bertujuan untuk memberikan penjelasan secara nyata terkait pemberian izin dan kemampuan pengelolaan dari dinas instansi terkait.

Tabel 3. Luas Lahan Berizin terhadap tanpa izin akibat Pertambangan Rakyat Kecamatan Talang Kelapa dan Rambutan

Kecamatan	Berizin (Ha)	Bukaan Lahan (Ha)	Perbandingan (Ha)
Talang Kelapa	8,00	128,67	1 : 16,09
Rambutan	27,21	317,22	1 : 12,22
Jumlah	35,21	445,89	

Sumber : Penelitian dan Pengolahan data 2015

Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, antara lain :

1. Keterbatasan aparatur pemerintah kabupaten dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan ilegal tersebut;
2. Kekeliruan pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan;
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, baik terhadap lingkungan, peraturan dan penambangan yang baik dan benar;
4. Pemberian aparat hukum yang berwenang terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

d. Pemukiman

Banyuasin Dalam Angka (BDA) 2015 menunjukkan penduduk Kabupaten Banyuasin tahun 2013 berjumlah 788.286 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2014 799.998 jiwa. Penduduk pada lokasi penelitian di Kecamatan Talang Kelapa tahun 2014 berjumlah 131.387 jiwa dan penduduk pada lokasi penelitian di Kecamatan Rambutan tahun 2014 berjumlah 42.696 jiwa.

e. Kegiatan Usaha di Luar Kegiatan Pertambangan di Lokasi Batasan Penelitian

Di Kecamatan Talang Kelapa, meliputi 5 (lima) macam kegiatan usaha yaitu berupa kolam ikan air tawar, peternakan ayam, kebun kelapa sawit, kebun karet dan kegiatan usaha lain.

Di Kecamatan Rambutan meliputi 5 (lima) macam kegiatan usaha yaitu berupa kolam ikan air tawar, peternakan ayam, kebun kelapa sawit, kebun karet dan persawahan.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Berdasarkan digitasi peta RTRW untuk rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banyuasin pada daerah penelitian diperoleh peruntukan pola ruang wilayah untuk daerah dalam batasan kawasan penelitian di Kecamatan Talang Kelapa berupa areal pemukiman perkotaan, areal pemukiman pedesaan dan areal perkebunan karet. Sedangkan pola ruang wilayah untuk daerah dalam batasan kawasan penelitian di Kecamatan Rambutan diperuntukkan berupa areal persawahan, areal perkebunan kelapa sawit, areal peternakan, areal pemukiman pedesaan dan areal perkebunan karet.

Hasil digitasi tersebut di atas, untuk wilayah pertambangan rakyat pada kedua daerah penelitian tidak terakomodir dalam peta pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, padahal kondisi eksisting kedua daerah penelitian tersebut adalah lokasi penambangan rakyat.

5. Sarana/Fasilitas Umum

Analisis Skalogram menggunakan sarana/fasilitas umum sebagai objek dan desa/kelurahan sebagai subjek dalam penelitian untuk tiap-tiap kecamatan. Objek yang digunakan adalah : Fasilitas Pendidikan;

- ✓ Fasilitas Kesehatan;
- ✓ Fasilitas Peribadatan;
- ✓ Fasilitas Ekonomi; dan
- ✓ Fasilitas Pendukung.

a. Kecamatan Talang Kelapa

Di wilayah Kecamatan Talang Kelapa menggunakan 12 (dua belas) subjek Desa/Kelurahan, yaitu Sukajadi, Kenten, Sukomoro, Air Batu, Tanah Mas, Talang Keramat, Gasing, Talang Buluh, Kenten Laut, Sungai Rengit, Sungai Rengit Murni dan, Pangkalan Benteng, sedangkan objek yang digunakan sebanyak 25 (dua puluh lima), yaitu :

- ✓ Fasilitas Pendidikan (PAUD, TK, SD, SLTP/MTs, SMU/MA);

- ✓ Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Poskesdes, Posyandu, Apotek, Toko Obat);
- ✓ Fasilitas Peribadatan (Masjid, Langgar/Surau, Gereja);
- ✓ Fasilitas Ekonomi (KUD/Non KUD, Pasar Tidak Permanen, Mini Market, Toko Kelontong);
- ✓ Fasilitas Pendukung (Kantor Pos, Restoran, Kedai Makanan, Hotel, Penginapan).

b. Kecamatan Rambutan

Di wilayah Kecamatan Rambutan menggunakan 19 (sembilan belas) subjek Desa/Kelurahan, yaitu Sungai Pinang, Sungai Kedukan, Rambutan, Sungai Dua, Sako, Tanjung Kerang, Tanjung Merbu, Pangkalan Gelebak, Suka Pindah, Gelebak Dalam, Tanah Lembak, Menten, Pelaju, Parit, Pulau Parang, Kebon Sahang, Desa Baru, Siju dan Durian Gadis, sedangkan objek yang digunakan sebanyak 15 (lima belas), yaitu :

- ✓ Fasilitas Pendidikan (TK/PAUD, SD, SLTP/MTs, SMU/MA);
- ✓ Fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Praktek Dokter, Poskesdes, Posyandu);
- ✓ Fasilitas Peribadatan (Masjid, Langgar/Surau);
- ✓ Fasilitas Ekonomi (KUD/Non KUD, Pasar Tidak Permanen, Mini Market, Toko Kelontong);
- ✓ Fasilitas Pendukung (Kedai Makan).

6. Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan Kriteria Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Penetapan wilayah pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 huruf (d) dinyatakan bahwa luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar dan Pasal 22 huruf (f) dinyatakan merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun serta dilanjutkan pada Pasal 24 dinyatakan bahwa wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.

Berdasarkan data yang didapat, kegiatan pertambangan rakyat di kedua kecamatan tersebut dapat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.

7. Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Program yang dilakukan untuk pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Banyuasin salah satunya seperti Pengembangan Kawasan Pertambangan, melalui inventarisasi daerah yg berpotensi untuk usaha pertambangan, Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat, relokasi & lokalisasi tambang rakyat dan rehabilitasi lahan pasca tambang (RTRW Kabupaten Banyuasin, 2011).

Berdasarkan fakta yang terlihat, program pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan kawasan pertambangan rakyat golongan batuan tidak terakomodir dalam suatu peta pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten tahun 2012-2032.

a. Wilayah Penelitian Kecamatan Talang Kelapa

Overlay peta pola ruang RTRW Kabupaten Banyuasin terhadap lahan bekas pertambangan golongan batuan *eksisting* dalam wilayah batasan kawasan penelitian di Kecamatan Talang Kelapa dengan luasan 724,5 Hektar, didapat 128,67 Hektar atau sekitar (17,8%) luas lahan bukaan *eksisting* pertambangan, persentase dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Luas Lahan Bukaan Eksisting terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten

Uraian	Luas Bukaan Eksisting (Ha.)	Luas Bukaan eksisting Vs. Pola Ruang (%)
Lahan Bukaan Eksisting	128,67	
Bukaan di Pemukiman Perkotaan	121,87	18,6175
Bukaan di Pemukiman Pedesaan	6,8	12,8060
Bukaan di Perkebunan Karet	0,0	0,0
Total	128,67	

b. Wilayah Penelitian Kecamatan Rambutan

Overlay peta pola ruang RTRW Kabupaten Banyuasin terhadap lahan bekas pertambangan golongan batuan *eksisting* dalam wilayah batasan kawasan penelitian di Kecamatan Rambutan dengan luasan 3.461 Hektar, didapat seluas 317,22 Hektar atau sekitar (9,2%) lahan bukaan *eksisting* pertambangan, persentase dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4.5. Distribusi Luas Lahan Bukaan Eksisting terhadap Pola Ruang RTRW Kabupaten

Uraian	Luas Bukaan Eksisting (Ha.)	Luas Bukaan Eksisting Vs. Pola Ruang (%)
Lahan Bukaan Eksisting	317,22	
Bukaan di Perkebunan Karet	302,69	12,9079
Bukaan di Persawahan	1,776	0,3865
Bukaan di Perkebunan Sawit	1,664	0,4082
Bukaan di Pemukiman Pedesaan	11,09	8,0421
Total	317,22	

8. Analisis Spasial

Pada penelitian ini digunakan fungsi analisis spasial seperti analisis tumpangtumpang (overlay) dan analisis *buffer*.

Analisis overlay atau sering disebut tumpangtumpang merupakan analisis yang menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukannya dan overlay peta merupakan proses dua peta tematik dengan areal yang sama dan menghamparkan satu dengan yang lain untuk membentuk satu layer peta baru.

Analisis *Buffer* merupakan analisis yang dapat menghasilkan peta spasial baru yang berbentuk poligon atau zona dengan jarak tertentu dari peta spasial yang menjadi masukannya.

a. Wilayah Penelitian Kecamatan Talang Kelapa

Berdasarkan hasil pengolahan data wilayah pemukiman merupakan areal yang relatif sulit untuk dilakukan relokasi, sedangkan kawasan temak ayam dan temak ikan merupakan areal yang relatif rendah dan tidak potensial untuk dilakukan penambangan. Hasil analisis *buffer* dapat dilihat pada (Gambar 5).

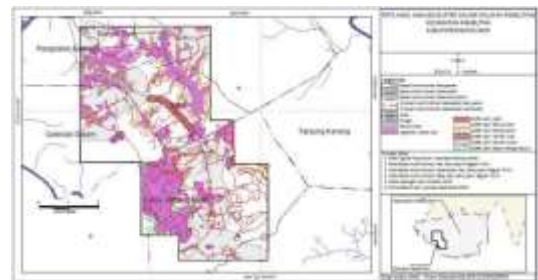
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, di wilayah penelitian Kecamatan Talang Kelapa tidak dapat dibuat suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), karena tidak ada zona bebas yang memenuhi kriteria dalam peraturan menteri diatas.



Gambar 5. Peta Hasil Analisis Buffer Wilayah Penelitian Kecamatan Talang Kelapa

b. Wilayah Penelitian Kecamatan Rambutan

Hasil analisis *buffer* dapat dilihat gambar berikut :

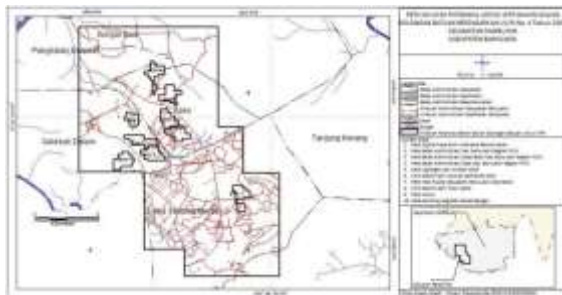


Gambar 6. Peta Hasil Analisis Buffer Wilayah Penelitian Kecamatan Rambutan

Untuk melakukan analisis *overlay* sebagai masukannya, maka digunakan setidaknya 6 (enam) peta antara lain peta tata ruang, Citra Satelit atau foto Udara, peta kontur, peta *eksisting* kegiatan penambangan, peta wilayah potensial bahan galian golongan batuan dan peta hasil analisis *buffer*. Dari overlay peta-peta tersebut akan didapat data baru untuk membentuk satu layer peta baru yang

merupakan peta yang dapat direkomendasikan sebagai wilayah-wilayah yang relatif potensial dan dapat dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai amanat peraturan perundangan, sebagaimana dapat dilihat pada (Gambar 7) dan Tabel 6. menjelaskan lokasi dan luas lahan tersebut.

Selanjutnya, untuk wilayah bekas bukaan tambang dan atau wilayah eksisting penambangan yang masuk dalam zona pemukiman dan zona kegiatan usaha lain menjadi suatu pertimbangan untuk tidak dilakukan kegiatan penambangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya resiko penambangan.



Gambar 6. Peta Wilayah Potensial Komoditas Tambang Golongan Batuan di Kecamatan Rambutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tabel 6. Luas Lahan Potensial Pengembangan Kegiatan Penambangan Rakyat di Kecamatan Rambutan

Blok	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Luas (Ha.)	Keterangan
A	Desa Pangkalan Gelebak dan Desa Sako	24,80	Ketentuan luasan
B	Desa Pangkalan Gelebak	24,50	berdasarkan
C	Desa Pangkalan Gelebak	24,21	Pasal 22
D	Desa Gelebak Dalam	14,10	huruf (d)
E	Desa Pangkalan Gelebak	24,67	UU No. 4
F	Desa Gelebak Dalam	24,85	Tahun 2009
G	Desa Gelebak Dalam	24,98	
H	Desa Gelebak Dalam	24,82	
I	Desa Tanjung Merbu	24,98	
Total		211,91	

9. Potensi Komoditas Tambang dan Keekonomian

Berdasarkan hasil pengamatan dari peta topografi dan pengamatan lapangan bentuk sebaran komoditas tambang yang berada di Kecamatan Rambutan berupa dataran bergelombang.

Hasil perhitungan berdasarkan dari Tabel 6 diperoleh total volume insitu $12.780.970,83 \text{ m}^3$ atau dengan faktor pengembangan sebesar 0,74, maka volume lode adalah $22.238.889,24 \text{ m}^3$, bila harga jual Rp. 35.000,-/ m^3 , maka nilainya mencapai Rp. 778.361.123.510,55,-. Bila wilayah ini ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, maka pemerintah dapat menarik retribusi sebagai pendapatan daerah sesuai ketentuan daerah sebesar Rp. 3.750,-/ m^3 , maka nilai retribusi daerah mencapai Rp. 83.395.834.661,85,-.

10. Analisis Skalogram

Analisis Skalogram dipergunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde-orde pusat pertumbuhan. Analisis digunakan dengan berdasarkan kepada jumlah unit dan jenis fasilitas umum yang ada. Hasil dari orde tertinggi sampai ke orde terendah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Skalogram di Kecamatan Talang Kelapa

No.	Desa/Kelurahan	Orde
1.	Sukajadi	I
2.	Tanah Mas	II
3.	Gasing	III
4.	Kenten	IV
5.	Sukomoro	V
6.	Air Batu	VI
7.	Kenten Laut	VII
8.	Talang Keramat	VIII
9.	Talang Buluh	IX
10.	Sungai Rengit Murni	X
11.	Pangkalan Benteng	XI
12.	Sungai Rengit	XII

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan kegiatan pertambangan rakyat tidak dominan mempengaruhi pusat pertumbuhan, tetapi terdapat beberapa komponen lain yang mempengaruhi, seperti kegiatan ekonomi, letak suatu daerah terhadap jalan utama dan daerah yang berbatasan langsung dengan ibukota provinsi, contoh : Kelurahan Tanah Mas, Desa Gasing dan Kelurahan Kenten.

Untuk wilayah Kecamatan Rambutan dengan hasil yang didapat dari orde tertinggi sampai ke orde terendah dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Skalogram di Kecamatan Rambutan

No.	Desa/Kelurahan	Orde	Keterangan
1.	Sungai Pinang	I	
2.	Rambutan	II	Kegiatan Pertambangan
3.	Kedukan	III	
4.	Tanjung Merbu	IV	Terdapat Kegiatan Pertambangan
5.	Sungai Dua	V	Terdapat Kegiatan Pertambangan
6.	Tanjung Kerang	VI	
7.	Sako	VII	Terdapat Kegiatan Pertambangan
8.	Suka Pindah	VIII	
9.	Tanah Lembak	IX	
10.	Gelebak Dalam	X	Terdapat Kegiatan Pertambangan
11.	Siju	XI	
12.	Pangkalan Gelebak	XII	
13.	Menten	XIII	Terdapat Kegiatan Pertambangan
14.	Pelaju	XIV	
15.	Parit	XV	
16.	Pulau Parang	XVI	
17.	Kebon Sahang	XVII	
18.	Baru	XVIII	
19.	Durian Gadis	XIX	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan kegiatan pertambangan rakyat tidak dominan mempengaruhi pusat pertumbuhan, tetapi terdapat beberapa komponen lain yang mempengaruhinya, seperti kegiatan ekonomi, letak suatu daerah terhadap jalan utama, letak suatu daerah berbatasan dengan ibukota provinsi.

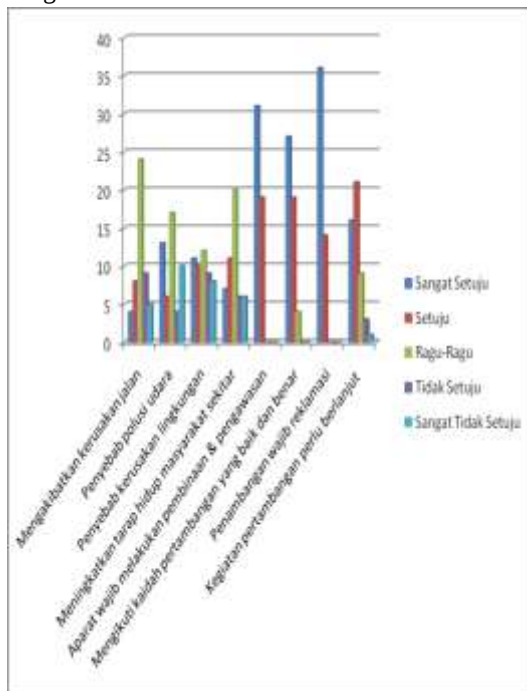
11. Persepsi Masyarakat terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat

Sampel acak diambil dari 3 (tiga) kalangan kepentingan yang terkait dalam kegiatan usaha pertambangan rakyat di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan tempat penelitian dilakukan. Kelompok kepentingan tersebut, yaitu : kalangan pemerintah, kalangan pelaku usaha dan kalangan masyarakat.

Dari beberapa pendapat diatas, untuk kegiatan usaha pertambangan rakyat di Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan umumnya, segera melakukan penataan barbagai aspek, seperti administrasi (yaitu: pembuatan peraturan perundangan terkait reklamasi lahan, peraturan terkait perizinan pertambangan bahan galian golongan batuan), teknis (seperti: pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan) dan lingkungan (seperti: pengawasan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup), guna keberlanjutan usaha untuk meminimalkan resiko.

12. Trend Persepsi Masyarakat

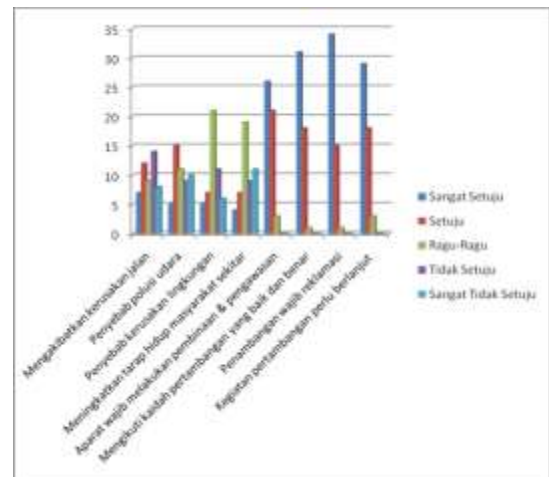
Hasil quesioner tertutup yang diajukan ke responden di Kecamatan Talang Kelapa disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Grafik Responden Masyarakat Sekitar Lokasi dan Jalur Transportasi di Kecamatan Talang Kelapa

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat keberadaan kegiatan pertambangan di Kecamatan Talang Kelapa cukup mendapat dukungan masyarakat sekitar, namun masyarakat ingin sarana jalan yang dilalui armada pengangkut hasil produksi dilakukan perawatan dan penyiraman. Masyarakat juga sangat berharap kepada aparat pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut agar kegiatan penambangan dilakukan secara baik dan benar, melakukan reklamasi pasca tambang dan melakukan penataan wilayah pertambangan, sehingga kegiatan penambangan dapat terus berlanjut tanpa mengganggu lingkungan sekitar.

Keberlanjutan kegiatan penambangan di Kecamatan Talang Kelapa ini tidak didukung dengan kondisi wilayah sekitar penambangan yang sudah terlalu dekat dengan pemukiman, yang sebaiknya merupakan lokasi reklamasi.



Gambar 8. Grafik Responden Masyarakat Sekitar Lokasi dan Jalur Transportasi di Kecamatan Rambutan

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat masyarakat mendukung keberadaan kegiatan penambangan di Kecamatan Rambutan, masyarakat sangat berharap kepada aparat pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut agar kegiatan penambangan dilakukan secara baik dan benar, melakukan reklamasi pasca tambang dan melakukan penataan wilayah pertambangan, sehingga kegiatan penambangan dapat terus berlanjut tanpa mengganggu lingkungan sekitar.

Dukungan masyarakat terhadap keberadaan kegiatan pertambangan rakyat pada 2 (dua) kecamatan tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan daerah dari pajak penambangan komoditas tambang golongan batuan pada tahun 2013 sebesar Rp. 469.326.280,- dimana pendapatan pajak tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp. 545.963.090,- pada tahun 2014 atau naik sebesar 14,037% dari tahun sebelumnya. (BDA,2015).

Pendapatan perkapita untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banyuasin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu : sebesar Rp. 14.231.275,- pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp. 15.231.727,- pada tahun 2012, meningkat lagi sebesar Rp.16.232.352,- pada tahun 2013 dan meningkat menjadi Rp. 17.013.606,- pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan rata-rata sekitar 5,774% per tahun.(BDA,2015).

13. Dampak Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat

Beberapa hal terkait dampak sosial dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penambangan rakyat dari hasil pengamatan lapangan, antara lain :

1. Tidak terlihat secara signifikan untuk warga sekitar terkait keberadaan kegiatan penambangan rakyat;
2. Memberikan peningkatan pendapatan khususnya bagi pedagang manisan;
3. Memberikan pendapatan yang lebih, bagi pemilik tanah yang tanahnya dijadikan sebagai tempat kegiatan usaha penambangan;

14. Dampak Lingkungan dari Penggunaan Lahan

Dari hasil pengamatan lapangan terkait dampak lingkungan dari penggunaan lahan untuk kegiatan usaha penambangan rakyat, terdapat beberapa hal, sebagai berikut :

1. Areal bekas penambangan menjadi kritis, karena tidak dilakukan pengelolaan terhadap lingkungan bekas kegiatan penambangan tersebut;
2. Penurunan muka air tanah pada sumur-sumur warga disekitar lokasi kegiatan usaha penambangan;
3. Terbentuknya polusi udara di pemukiman warga di sekitar lokasi penambangan, karena kegiatan tersebut terlalu dekat dengan pemukiman;

15. Saran Regulasi

Kondisi yang ditemukan di lapangan dan hasil pengolahan data terkait peraturan perundangan terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Lakukan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sebagai dasar untuk keberlanjutan kegiatan pertambangan rakyat;
2. Perjelas aturan pelaksanaan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan baik secara administrasi, teknis operasional dan pengelolaan lingkungan akibat kegiatan penambangan rakyat;
3. Buat aturan terkait reklamasi lahan kritis yang sudah cukup luas, akibat kegiatan pertambangan tersebut, untuk meminimalisir dampak lingkungan.

terdapat sebanyak 12 (dua belas) blok bukaan dengan luas 128,67 Hektar berbanding dengan 8,00 Hektar izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten, sedangkan di Kecamatan Rambutan tersebar di 5 (lima) desa, yaitu : Desa Sungai Dua, Menten, Gelabak Dalam, Sako dan Tanjung Merbu, terapat sebanyak 22 (dua puluh dua) blok bukaan dengan luas 317,22 Hektar berbanding dengan 27,21 Hektar izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kedua Kecamatan tersebut merupakan daerah tambang rakyat dimulai sejak tahun 1985;

2. Kriteria penetapan wilayah pertambangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 22 dan Pasal 24. Wilayah Kecamatan Talang Kelapa relatif sulit untuk dilakukan pengembangan karena sudah padatnya pemukiman penduduk dibagian Timur, Selatan dan Barat daerah penelitian, dan bagian Utara dengan topografi relatif rendah banyak terdapat lokasi peternakan ayam dan ikan.

Pengembangan wilayah di Kecamatan Rambutan masih cukup tersedia luas, dengan potensi sumberdaya relatif besar dan jauh dari pemukiman, sedangkan kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan bukan merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi masyarakat;

3. Pengembangan wilayah pertambangan komoditas tambang golongan batuan sebaiknya tidak dilakukan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa, namun diarahkan pada perencanaan program reklamasi. Pengembangan kegiatan penambangan di wilayah Kecamatan Rambutan masih cukup tersedia dengan luasan 211,91 Hektar dan/atau volume lose sekitar 22.238.889,24 m³ yang terbagi dalam 9 (sembilan) blok yang tersebar di 4 (empat) desa, yaitu : Desa Pangkalan Gelebak, Desa Sako, Desa Gelebak Dalam dan Desa Tanjung Merbu, dengan potensi nilai retribusi mencapai Rp.83.395.834.661,85,-, apabila wilayah pertambangan rakyat ditetapkan;

4. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dihubungkan dengan pasal 22 huruf (f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

5. Pemerintah daerah seyogyanya segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat di Kecamatan Rambutan dengan melihat kondisi *eksisting* saat ini berdasarkan kriteria-kriteria yang berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;

IV. KESIMPULAN

1. Kegiatan usaha pertambangan golongan batuan dengan komoditas tambang tanah liat dan tanah urug di Kecamatan Talang Kelapa tersebar di 3 (tiga) kelurahan dan 1 (satu) desa, yaitu : Kelurahan Air Batu, Sukomoro, Sukajadi dan Desa Sungai Rengit,

6. Para sumberdaya aparatur (pegawai) perlu meningkatkan kemampuan baik aspek administrasi, teknis maupun aspek lingkungan dalam melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terkait bidang pertambangan;
7. Instansi terkait sebagai satuan kerja perangkat dinas yang berwenang dalam kegiatan usaha pertambangan sepatutnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis, agar selalu dapat memonitor penggunaan lahan tambang dan dihubungkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kegiatan penambangan;
8. Pemerintah daerah seyogyanya segera membuat program reklamasi lahan bekas penambangan yang realistis untuk meminimalkan lahan kritis di Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sukomoro dan Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Tanjung Merbu, Desa Sako dan Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2002, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan*, Jakarta.
- Anonim, 2003, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan*, Jakarta.
- Anonim, 2007, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya*, Jakarta.
- Anonim, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan*, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta.
- Anonim, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang*, Jakarta.
- Anonim, 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032*, Banyuasin.
- Anonim, 2013, *Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota*, Jakarta.
- Anonim, 2013, *Banyuasin Dalam Angka 2012*, Badan Pusat Statistik, Banyuasin.
- Anonim, 2014, *Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta.
- Anonim, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- Anonim, 2015, *Banyuasin Dalam Angka 2014*, Badan Pusat Statistik, Banyuasin.
- Barlowe, R., 1986, *Land Resource Economics, The Economics of Real Estate*. Prentice-Hall Inc. New York, 653 p.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, 2011, *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin 2012-2032*, Sumatera Selatan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2013, *Tutorial Arcgis10 Tingkat Dasar*, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Crystiana. Indah, Susanto. Tri Muji, 2013, *Pemanfaatan Citra Ikonos untuk Mengkaji Permasalahan Sosial pada Pengembangan Lapangan Tua*, Lemigas, Jakarta.
- Dewi Handayani, Soelitjadi., Sunardi, 2005, *Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografis, Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, Volume X, Semarang.
- Edy Prahasta, 2005, *Sistem Informasi Geografis*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, C.V. Informatika, Bandung.

- Edy Prahasta, 2009, *Sistem Informasi Geografis : Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*, C.V. Informatika, Bandung.
- Gandasasmita K, 2001, *Analisis Penggunaan Lahan Sawah dan Tegalan di Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu Jawa Barat*. (Disertasi), tidak dipublikasi. Sekolah Pasca Sarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Harmawan K, 2007, *Praktek Pertambangan yang Baik dan Benar*.
- Masri Suandi, Sutriyono, 2012, *Kajian Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Bengkulu Selatan*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Najib, Junaedi, 2009, *Kajian Kelayakan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali*, Surabaya.
- Nur Mansyah, 2013, *Studi Tentang Dampak Pertambangan Batubara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga*, eJournal Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- Restu Juniah, 2013, *Model Keberlanjutan Lingkungan Pertambangan Batubara (Kajian nilai jasa lingkungan, air void Tambang untuk air baku di PT Bukit Asam, Tbk Tanjung Enim Sumatera Selatan)*, Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Syarief. Ade, Rustiadi. Eman, Hidayat. Aceng, 2014, *Analisis Subsektor Perikanan dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Indramayu*, Volume 16 Nomor 2, Tata Loka, Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro.